

**PERKEMBANGAN KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN  
BANYUMAS**  
(Studi Kasus Daerah Irigasi Andongbang, Banjaran, dan Tajum)  
***DEVELOPMENT OF PERFORMANCE OF WATER USER FARMERS ORGANIZATION IN  
BANYUMAS REGENCY***  
(Case Study of Irrigated Areas of Andongbang, Banjaran, and Tajum)

Oleh:

Hidayat M.<sup>1)</sup> dan Suroso<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

<sup>2)</sup> Jurusan Teknik Sipil Unsoed Purwokerto  
(Diterima: 10 Maret 2005, disetujui: 12 Juli 2005)

**ABSTRACT**

Government has given the real role to farmers, in Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) organization, to manage irrigation systems agree with the existing rules. To know P3A' s development achievement in Banyumas region, it was evaluated the achievement of three P3A, i.e : D.I Andongbang, D.I Banjaran, and D.I Tajum. The method of evaluation used was survey by using P3A' s evaluation form with six (6) aspects, i.e: organization, water use, maintenance, financial, physical condition, and guideline. The result showed that the grade of P3A achievement of D.I Andongbang, D.I Banjaran, and D.I Tajum are 10,96 (54,8%), 10,77 (53,85%), and 15,83 (79,15%) with criteria poor, poor, and good respectively. And the level of their development P3A are developing, developing and developed respectively.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara agraris di mana pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan di bidang pertanian untuk dapat meningkatkan produksi pangan adalah dengan ekstensifikasi yaitu usaha peningkatan produksi pangan dengan cara meluaskan areal tanam, dan intensifikasi yaitu peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.

Pembangunan saluran irigasi untuk menunjang penyediaan bahan pangan nasional sangat diperlukan,

sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang, dan tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis (Sudjarwadi, 1990).

Salah satu persoalan utama yang terjadi dalam penyediaan air irigasi adalah semakin langkanya ketersediaan air (water scarcity) pada waktu-waktu tertentu. Pada sisi lain permintaan air untuk berbagai kebutuhan cenderung semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, beragamnya pemanfaatan air, berkembangnya pembangun-an, serta kecenderungan menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh berbagai kegiatan (Bustomi, 2003).

guna lahan dari kawasan vegetasi menjadi non vegetasi sehingga air hujan banyak melimpas menjadi aliran permukaan (surface flow).

Permasalahan lain dalam penyediaan air irigasi adalah dalam hal pengaturan dan pendistribusian. Secara teknis pengaturan dan pendistribusian air irigasi dapat direncanakan dan dilakukan secara akurat dan optimum berdasarkan teknologi yang ada. Namun masih terdapat kendala besar dalam pengaturan dan pendistribusian air yang berasal dari faktor non teknis seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam praktek pemberian air irigasi pada petak-petak sawah sering ditemui adanya pemberian air irigasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman dan cenderung sangat berlebih terutama untuk tanaman tertentu seperti tanaman padi yang dilakukan dengan penggenangan. Doorenbos dan Pruitt (1977) mendefinisikan kebutuhan air tanaman sebagai jumlah air yang disediakan untuk mengimbangi air yang hilang akibat evaporasi dan transpirasi. Kebutuhan air di lapangan merupakan jumlah air yang harus disediakan untuk keperluan pengolahan lahan ditambah kebutuhan air tanaman.

Walker (1981 dalam Marhendi, 2002), melakukan penelitian terhadap cara-cara pemberian air yang dilakukan petani di Jawa Barat. Menurut Walker (1981) sebagian petani di Jawa Barat masih menggunakan air irigasi secara berlebihan. Hasil penelitian yang dilakukan di lokasi Dermaga dekat Bogor dan Sukamanah di pantai utara Jawa Barat menunjukkan bahwa sekitar 50% air irigasi terbuang percuma.

Marhendi (2002) melakukan

penelitian peluang penyimpangan pemberian air irigasi daerah irigasi Kalibawang Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan pemberian air irigasi. Hal ini disebabkan kondisi SDM di lapangan yang kurang siap serta sarana dan prasarana seperti pintu air (intake), bendung, dan beberapa sarana lain yang sudah tidak layak menjadi penyebab terjadinya penyimpangan pemberian air irigasi.

Menurut Arief (2001), pengelolaan irigasi merupakan bagian dari sistem sosio-kultural masyarakat yang terdiri dari subsistem budaya, subsistem sosial ekonomi, dan subsistem artifak dengan teknologi termasuk di dalamnya.

Al-Jayyousi (1999) menyimpulkan bahwa peningkatan efisiensi dalam sistem jaringan irigasi mempunyai kontribusi besar untuk penghematan air. Peningkatan efisiensi dalam sistem jaringan irigasi memperhitungkan aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi.

Pada tahun 1999, pemerintah menge-luarkan maklumat tentang reformasi di bidang irigasi yang diikuti oleh terbitnya Inpres No 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang meliputi:

- a. Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;
- b. Mengembangkan kelembagaan Perkumpul-an Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A);
- c. Menyerahkan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A;
- d. Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) dan pembiayaan pengelolaan sistem irigasi;
- e. Keberlanjutan sistem irigasi.

Kemudian pada tahun 2001

Dengan terbitnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, peraturan-peraturan perundangan di atas perlu disesuaikan. Menurut UU No.7 tahun 2004 pasal 41, pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) sedangkan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah dengan tetap melibatkan perkumpulan petani pemakai air.

Dari peraturan perundangan di atas pada prinsipnya memberikan peran yang nyata kepada P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi, hanya teknis penyerahan batas kewenangan yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan P3A saat ini.

P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air (pasal 4 Kepmendagri No. 50 tahun 2001 tentang pemberdayaan P3A). P3A dimaksud dengan kata lain adalah P3A desa/kelurahan yang mempunyai wilayah kerja di petak sawah beririgasi/tersier dalam satu desa. P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu, dapat bergabung sampai terbentuk Gabungan P3A (GP3A) atau dengan nama lain pada tingkat pelayanan sekunder, secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan (pasal 5 Kepmendagri No. 50 tahun 2001 tentang pedoman pemberdayaan P3A). GP3A ini merupakan wadah beberapa P3A desa/kelurahan yang mendapat pelayanan air irigasi dalam satu ruas saluran sekunder. GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk Induk IP3A (IP3A) atau dengan nama lain pada tingkat

daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan (pasal 6 Kepmendagri No. 50 tahun 2001 tentang pedoman pemberdayaan P3A). IP3A merupakan wadah beberapa GP3A dan atau para P3A dalam satu daerah irigasi.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan P3A dalam mengelola jaringan irigasi, dilakukan Evaluasi dan Monitoring perkembangan P3A. Dengan hasil evaluasi ini, sehingga dapat diketahui kemampuan, kesadaran dan peran serta P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi sesuai batas kewenangan yang diberikan.

Pada tahun 2003 telah dilakukan evaluasi dan monitoring kinerja P3A di wilayah provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Pengembangan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Tengah. Tulisan ini merupakan catatan hasil penelitian tersebut khusus di wilayah Kabupaten Banyumas dengan sampel tiga Daerah Irigasi yaitu D.I. Andongbang, D.I. Banjaran, dan D.I. Tajum.

## METODE EVALUASI

Pengambilan data di lapangan dilaksanankan dengan metode survei yaitu kepada kelompok P3A diambil datanya dengan Blanko Evaluasi P3A 6 aspek pada tahun 2003 oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Blanko evaluasi P3A tersebut terdiri dari 6 aspek yaitu:

- a. Aspek organisasi, nilai min = 0,10 dan maks = 1,50
- b. Aspek Penggunaan air, nilai min = 0,00 dan maks = 3,00
- c. Aspek pemeliharaan, nilai min = 0,00 dan maks = 3,00
- d. Aspek keuangan, nilai min = 0,00 dan maks = 2,50
- e. Aspek kondisi fisik, nilai min = 0,00 dan maks = 6,00

Nilai total 6 aspek tersebut dijadikan kriteria untuk melihat tingkat perkembangan P3A sebagai berikut:

1. P3A memiliki nilai  $< 8$ , keadaan status P3A “ Belum Berkembang (BB)” .
2. P3A memiliki nilai antara  $8 - 14$ , , keadaan status P3A “ Sedang Berkembang (SB)” .
3. P3A memiliki nilai  $> 14$ , keadaan status P3A “ Berkembang (B)” .

Dengan melihat nilai-nilai pada setiap aspek tersebut maka dapat dibandingkan antara nilai yang didapat per aspek dengan nilai maksimum per aspek, sehingga hasil kegiatan P3A tersebut dapat dipersentase sebagai berikut:

1. Persentase per aspek  $0 - 40 =$  Kriteria Kurang Sekali.
2. Persentase per aspek  $40 - 60 =$  Kriteria Kurang.
3. Persentase per aspek  $60 - 70 =$  Kriteria Cukup.
4. Persentase per aspek  $70 - 80 =$  Kriteria Baik.
5. Persentase per aspek  $80 - 100 =$  Kriteria Baik Sekali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Irigasi Andongbang yang dievaluasi terdiri dari 10 P3A tersier (dari 10 P3A tersier yang ada) dengan luas areal total 1971,53 Ha dengan jumlah anggota 3.150 petani terletak di Kecamatan Ajibarang, Cilongok dan Pekuncen. Nilai rata-rata per aspek hasil evaluasi 6 aspek P3A dan persen-tase nilai tersebut terhadap nilai maksimumnya adalah: aspek organisasi = 1,12 (75%) dengan kriteria Baik; aspek penggunaan air = 1,73 (58%) dengan kriteria Kurang; aspek peme-liharaan = 2,27 (76%) dengan kriteria Baik; aspek keuangan = 0 (0%) dengan kriteria Kurang Sekali; aspek kondisi fisik = 3,35

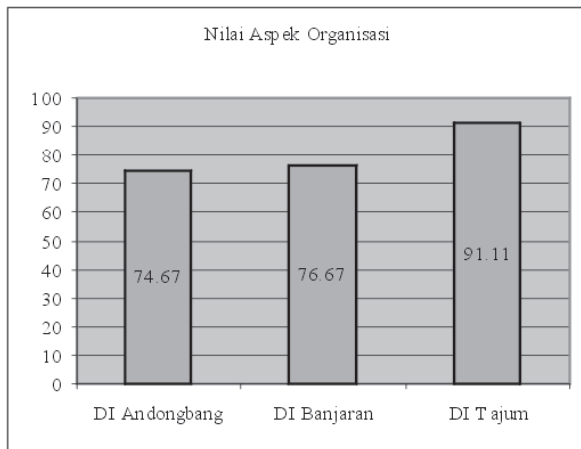
(56%) dengan kriteria Kurang; aspek pembina-an = 2,5 (63%) dengan kriteria Cukup. Total nilai yang diperoleh adalah 10,96 (54,8%) dengan kriteria Kurang dan tingkat perkembangan P3A adalah Sedang Berkembang.

Daerah Irigasi Banjaran yang dievaluasi terdiri dari 7 P3A tersier (dari 13 P3A tersier yang ada) dengan luas areal total 544,56 Ha dengan jumlah anggota 494 petani terletak di Kecamatan Patikraja, Purwokerto Barat dan Purwokerto Selatan. Nilai rata-rata per aspek hasil evaluasi 6 aspek P3A dan persentase nilai tersebut terhadap nilai maksimumnya adalah: aspek organisasi = 1,15 (77%) dengan kriteria Baik; aspek penggunaan air = 1,76 (59%) dengan kriteria Kurang; aspek pemeliharaan = 1,69 (56%) dengan kriteria Cukup; aspek keuangan = 1,11 (44%) dengan kriteria Kurang; aspek kondisi fisik = 2,93 (49%) dengan kriteria Kurang; aspek pembinaan = 2,14 (54%) dengan kriteria Kurang. Total nilai yang diperoleh adalah 10,77 (53,85%) dengan kriteria Kurang dan tingkat perkembangan P3A adalah Sedang Berkembang.

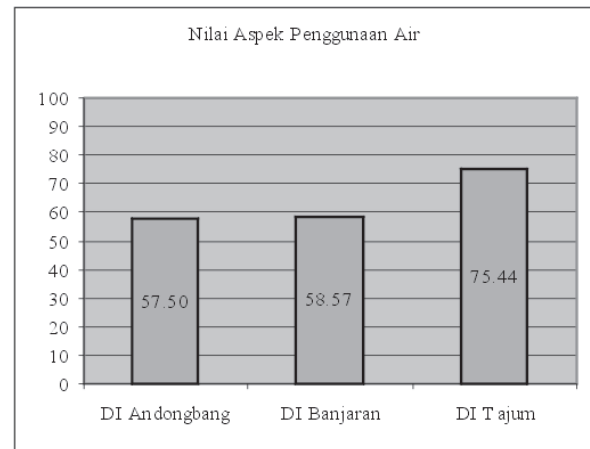
Daerah Irigasi Tajum terdiri dari 12 P3A tersier (dari 25 P3A tersier) dengan luas areal total 1848,19 Ha dengan jumlah anggota 4.660 petani terletak di Kecamatan Wangon, Jatilawang, dan Rawalo. Nilai rata-rata per aspek hasil evaluasi 6 aspek P3A dan persen-tase nilai tersebut terhadap nilai maksimumnya adalah: aspek organisasi = 1,37 (91%) dengan kriteria Baik Sekali; aspek penggunaan air = 2,26 (75%) dengan kriteria Baik; aspek peme-liharaan = 2,57 (86%) dengan kriteria Baik Sekali; aspek keuangan = 2,5 (100%) dengan kriteria Baik Sekali; aspek kondisi fisik

Perbandingan nilai per aspek untuk ketiga Daerah Irigasi dapat

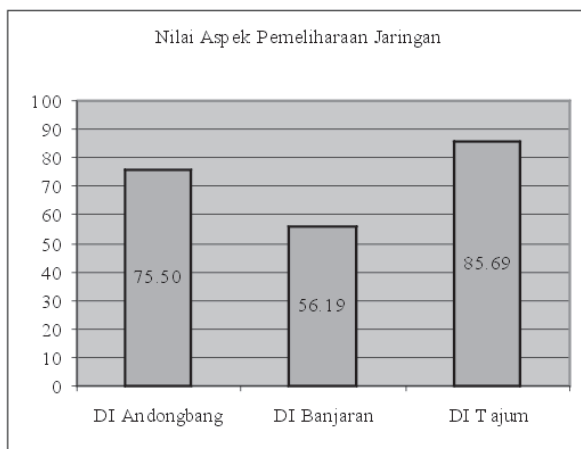
ditunjukkan kedalam grafik seperti terlihat dalam Gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan



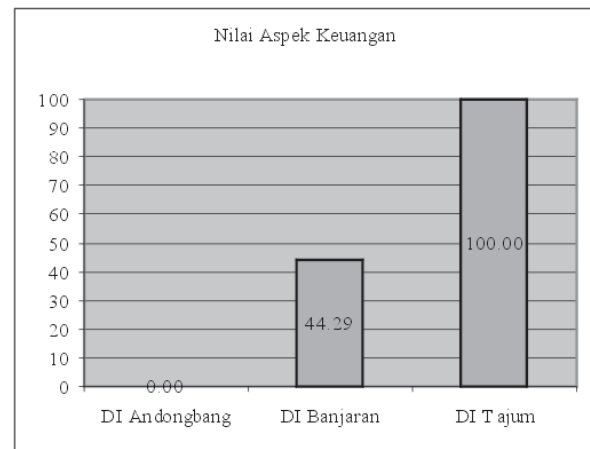
Gambar 1. Grafik nilai aspek organisasi



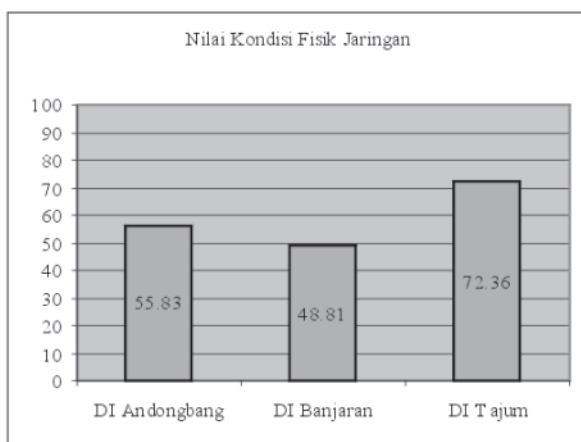
Gambar 2. Grafik nilai aspek penggunaan air



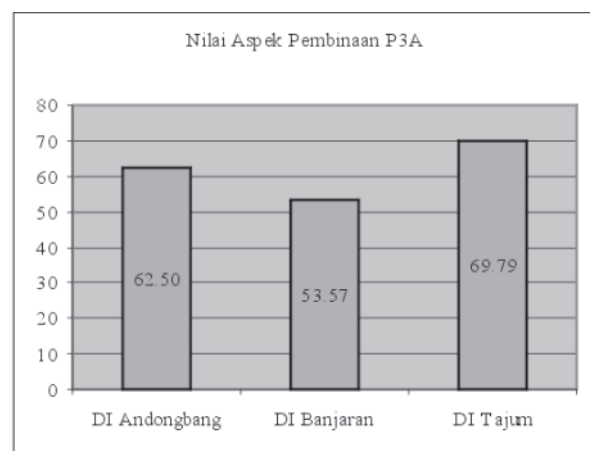
Gambar 3. Grafik nilai aspek pemeliharaan jaringan



Gambar 4. Grafik nilai aspek keuangan



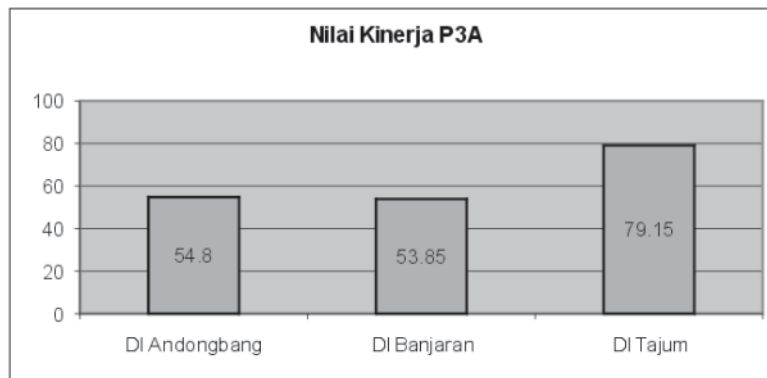
Gambar 5. Grafik nilai kondisi fisik jaringan



Gambar 6. Grafik nilai aspek pembinaan P3A

Perbandingan nilai total kinerja P3A untuk ketiga Daerah Irigasi dapat

ditunjukkan ke dalam grafik seperti terlihat dalam Gambar 7.



Gambar 7. Grafik nilai kinerja P3A

Dari Gambar 7 terlihat bahwa nilai kinerja P3A D.I Tajum lebih baik dibandingkan dengan P3A D.I Andongbang dan P3A D.I Banjaran. Hal ini dapat dipahami bahwa P3A Tajum terbentuk lebih dahulu dibanding P3A D.I Andongbang dan D.I Banjaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan air irigasi secara efektif dan efisien perlu proses dan pengalaman. Mengingat beragam dan terbatasnya kemampuan sumberdaya petani pemakai air. Namun hal demikian harus terus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak yang terkait untuk terus melakukan pembinaan yang intensif kepada P3A, sehingga pengelolaan air irigasi semakin menjadi lebih baik.

## KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa nilai kinerja P3A D.I Andongbang, Banjaran, dan Tajum secara berturut-turut adalah 10,96(54,8%); 10,77(53,85%); 15,85(79%) dengan kriteria Kurang; Kurang; Baik dan tingkat perkembangan Sedang Berkembang;

Sedang Berkembang; Berkembang. Sehingga untuk P3A D.I Andongbang dan P3A D.I Banjaran masih perlu mendapatkan pembinaan secara lebih intensif dari Tim Pembina yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jayyousi, O.R. 1999. Rehabilitation of Irrigation Distribution Systems: The Case of Jericho City, Int.j. Water Resources Management 13, 117-132p, Kluwer Academic Publisher, Netherlands.
- Anonim. 2001. Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.
- \_\_\_\_\_. 2001. Kepmendagri No. 50 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A.
- \_\_\_\_\_. 2003. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pada Daerah Irigasi R/U Partisipatif Jawa Tengah, Dinas PSDA Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Arif, S.S. 2001. Penerapan Teknologi Tata Air, Peluang, Kendala dan Prospek. Bahan Kursus Singkat Sistem Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah ke III, Jurusan

- Bustomi, F. 2003. Pandangan Petani Daerah Irigasi Glapan Timur Mengenai Hak Atas Air Irigasi. Jurnal Ilmiah VISI, PSI-SDALP Universitas Andalas, Padang.
- Dorrebons, J. and W.O. Pruitt. 1977. Guidelines for Predicting Crop water Requirements. Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
- Marhendi, T. 2002. Uji Distribusi Normal Dan Gamma Terhadap Peluang Penyimpangan Pemberian Air Irigasi. Jurnal Ilmu-ilmu Teknik Techno, Fakultas Teknik UMP, Purwokerto.
- Sudjarwadi. 1990. Teori dan Praktek Irigasi. Pusat Antar Universitas Ilmu Teknik, UGM, Yogyakarta.